



Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita

Miri Susanti, Nellis Mardhiah

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 23661, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 14, 2021
Revised: February 24, 2022
Accepted: March 19, 2022
Available online: March 30, 2022

KEYWORDS

Stunting, Governance, Children Under Five, Strategy, Prevention

CORRESPONDENCE

Name: Miri Susanti
E-mail: mirisusanti133@gmail.com

A B S T R A C T

Stunting is a condition of failure to thrive in toddlers, the government continues to campaign about the dangers of stunting, and stunting in Simeulue district is the 2nd highest in Aceh, so it is very necessary to handle this case. Based on the Simeulue Regent's Regulation Number 13 of 2019 concerning Integrated Stunting Prevention and Handling in the Village, it is based on the election of Simeulue Regency as the national stunting locus set by the Central Ministry. The determination was ratified through the decision of the head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia number 42 of 2020. The cause of the high stunting rate in Simeulue is the lack of nutrition in children under five, which stems from the lack of funds and posyandu facilities such as measuring instruments and weighing equipment (dacing) which are not fully available at every posyandu. The purpose of this study is to describe the Government's strategy in overcoming the prevalence of stunting in children under five in Simeulue Regency and how the government's efforts in building cooperation with the parties handling stunting prevention in children under five in Simeulue Regency. Using qualitative methods and data obtained from interviews with Mr. Andre as the head of the social welfare sub-sector and then analyzed. The results of the research, the government carried out eight stunting convergence actions and each action has its own implementation instrument and government also involves stakeholders to reach out.

PENDAHULUAN

Stunting adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada tubuh akibat kurangnya gizi kronis dalam jangka waktu lama (Hamalding, et al, 2020). Stunting sudah terjadi saat masih dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun (Intan. K, at all, 2017). Dan berakibat buruk bagi tumbuh kembang seorang anak (Widjayatri, at all, 2020). Pada tahun 2017, sekitar 22,2% atau 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting lebih dari setengahnya yang berasal dari Asia (55%) dan sepertiganya (39%) ada di Afrika (Rustiyani, L., & Susilo, R., 2020). Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, Asia Selatan merupakan proporsi terbanyak (58,7%) dan Asia Tengah merupakan proporsi paling sedikit (0,9%) (Hindratni, F., at all, 2021). Data Prevalensi balita stunting yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk kedalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/ *South-East Asia Regional* (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (Saputri & Tumangger, 2019).

Kondisi jangka panjang yang mungkin terjadi akibat stunting ini adalah dapat menghambat kondisi ekonomi serta meningkatkan kemiskina. Hal tersebut dapat terjadi karena stunting menghambat perkembangan motorik dan verbal, meningkatnya penyakit degeneratif, kejadian kesakitan bahkan sampai kematian (Yadika et al., 2019). Stunting juga mempengaruhi kemampuan belajar seorang anak (Yadika et al., 2019).

Prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Indonesia masih cukup tinggi 36,5%, melampaui batas *non public health* WHO yaitu 20% (Widanti, 2017). Aceh merupakan salah satu Provinsi yang tinggi angka prevalensi stunting di Indonesia. Pada tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar Indonesia disebutkan bahwa angka stunting di Aceh menduduki posisi ke-31 dari 34 Provinsi

di Indonesia yang menempati peringkat ketiga tertinggi dengan persentase 37,3% di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat. Faktor-faktor determinan daripada stunting yaitu faktor pendapatan keluarga, pola asuh ibu, riwayat imunisasi, riwayat infeksi penyakit, asupan protein, dan pendidikan ibu (Picauly & Toy, 2013). Hasil rilis yang di terima Serambinews.com, data Rikesdas tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Simulue berada di tingkat ke 2 terburuk setelah Kotamadya Subulussalam, yaitu 47,3 persen. Berdasarkan riset tersebut dapat menunjukkan bahwa angka stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Aceh dan salah satu Kabupaten yang tinggi angka stuntingnya adalah Kabupaten Simeulue.

Selama ini penanganan persoalan stunting masih menghadapi hambatan karena masih terdapat adanya ego sektoral di masing-masing OPD dan belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang belum mengerti secara keseluruhan mengenai program stunting. Hal ini dikarenakan terlambatnya informasi yang diperoleh, terputusnya informasi sosialisasi, para staf yang datang saat sosialisasi, dan keadaan demografi wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab untuk beberapa daerah tertentu. Penyebab lainnya dalam kasus ini yaitu belum optimal yaitu belum memperoleh seluk-beluk dalam melaksanakan program saat penelitian dilakukan sehingga daerah belum mengetahui langkah untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, Daerah juga membutuhkan pendampingan dari pusat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hambatan lainnya yaitu belum adanya basis data yang diperoleh agar konvergen dalam hal sasaran program pelaksanaan kegiatan berjalan dengan maksimal (Permanasari et al., 2020).

Selama ini, kejadian tentang pengurangan angka stunting pada anak balita menunjuk bahwa secara nasional prevalensi balita syunting pada tahun 2017 adaah 29,6%. Banyak sekali

dampak buruk yang timbul dari masalah stunting pada balita, yaitu turunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak (Sumardilah, D. S., & Rahmadi, A. 2019). Kajian ini berbeda karena penelitian ini mengacu kepada cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target yaitu dalam hal penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeulue menduduki peringkat ke 2 (dua) angka prevalensi stunting tertinggi dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sehingga ditetapkan ke dalam zona merah bersama dengan Kabupaten Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Pada tahun 2015 Persentase anak balita stunting di Kabupaten Simeulue sebanyak 35,7%. Selanjutnya, tahun 2016 menurun ke angka 28,6% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 35,7% (Simeulue, 2021). Sehingga Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai salah satu lokus stunting nasional dari 360 Kabupaten/Kota di Indonesia dan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Dukungan pemerintah pusat terutama anggaran sangat dibutuhkan bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai program intervensi penanganan stunting, Inovasi Pemerintah Daerah untuk terus mengawal program stunting sangat menentukan keberhasilan program Pemerintah dalam pemberantasan stunting. Inovasi tersebut perlu diberikan apresiasi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk penghargaan dan reward sinergi antar institusi pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat harus terus ditingkatkan, karena program penanganan stunting tidak akan pernah berhasil jika tidak ada sinergi antar pihak. Aspek regulasi dan peraturan akan membuat langkah pemerintah dan para pihak menjadi lebih cepat. Koordinasi data dan informasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting dan perlu ditingkatkan (Sujai, 2020). Pada tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor 42 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2021, Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai salah satu lokus stunting nasional dari 360 Kabupaten/Kota di Indonesia dan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPPEDA Kabupaten Simeulue yang bertempat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret s.d Agustus 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pemilihan metode tersebut untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan (Moleong, 1998). Peneliti juga ikut serta dalam kegiatan rapat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan stunting di Bappeda Kabupaten Simeulue. Di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilaksanakan melalui analisis dokumen kebijakan, dan studi pustaka. Studi pustaka yang merupakan penggunaan referensi yang mendukung isi penelitian ilmiah ini yang berasal dari buku, artikel atau website yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Stunting di Kabupaten Simeulue

Peran Pemerintah dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue

dapat dilihat pada pembentukan strategi yang direncanakan dan dilaksanakan. *Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019* tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa, disebutkan tujuan dikeluarkan Peraturan Bupati tersebut untuk meningkatkan komitmen pemerintah dan para stakeholders mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan untuk mewujudkan “Simeulue Bebas Stunting Tahun 2022”.

Dalam menyukseskan penanggulangan stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue, Pemerintah Kabupaten Simeulue dan para stakeholder membangun koordinasi yang bersifat lintas sektor yang melibatkan BAPPEDA untuk penyusunan kebijakan serta anggaran stunting di Kabupaten Simeulue, dinas PU untuk pembuatan sarana dan prasarana pencegahan stunting pada masyarakat, dinas kebersihan dan dinas-dinas terkait lainnya. Kabupaten Simeulue merupakan kabupaten tertinggi ke 2 stunting di provinsi Aceh setelah kota Subulussalam. Prestasi yang diraih pada tahun 2020. Di mana Kabupaten Simeulue dinobatkan sebagai Kabupaten dengan kinerja pencegahan dan penanganan stunting terbaik KE-II tingkat Provinsi Aceh. Dan satu lagi, menyandang predikat sebagai Kabupaten paling replikatif dalam pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Aceh.

Kabupaten Simeulue yang ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten lokus stunting Nasional oleh Pemerintah Pusat, lokus stunting terintegrasi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Penetapan tersebut disahkan melalui keputusan kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2021. Tugas pemerintah daerah untuk mengupayakan angka-angka stunting di kabupaten Simeulue, tidak hanya pemerintah daerah, diperlukan peran lembaga-lembaga, organisasi, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya untuk ikut serta berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue.

Strategi Pemerintah Simeulue dalam Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting di Kabupaten Simeulue

Adapun Strategi Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue yaitu, menguatkan peran dinas terkait melalui koordinasi lintas sektor yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Simeulue, menetapkan regulasi pendukung yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memonitor program kegiatan lintas sektor yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting, melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting sesuai petunjuk teknis kementerian dalam negeri, membangun kerjasama dengan lembaga, organisasi, akademisi, masyarakat, dan berbagai stakeholder terkait lainnya.

Perumusan Kebijakan Penanganan Stunting

Berdasarkan dari formulasi kebijakan perumusan strategi pemerintah dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting dapat dilihat dari formulasi kebijakan yaitu proses terbentuknya strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue dengan membentuk delapan aksi konvergensi yang akan di laksanakan. “Mengingat Kabupaten Simeulue masuk dalam zona kuning atau level tinggi dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh,” kata Kadis Kesehatan Aceh dr Hanif, saat melakukan kemitraan pemerintah Kabupaten Simeulue dan Unicef tahun 2019-2020. Melalui proses formulasi, penentuan solusi terhadap masalah yang diyakini prioritas utama di

Kabupaten Simeulue didiskusikan dan telah ditetapkan kebijakan untuk penanganannya. Kemudian setelah kebijakan tersebut terbentuk, maka akan lahirnya berbagai macam bentuk strategi yang dianggap mampu untuk memperbaiki masalah yang terjadi, seperti halnya dalam pencegahan dan penanganan stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue.

Menurut hasil dari penelitian yang telah dilakukan, keputusan kepala BAPPENAS didasarkan pada terpilihnya Kabupaten Simeulue sebagai lokus stunting nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pusat, alasan lainnya adalah tingginya angka stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Sehingga harapan besar Kementerian Pusat, penggunaan dana alokasi khusus dapat difokuskan dalam menyelesaikan masalah prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue. Kemudian setelah ditetapkannya Kabupaten Simeulue sebagai lokus stunting nasional, maka dibutuhkan sasaran lokasi yang menjadi lokus pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue di setiap desanya.

KERJA Sama antara Pemerintah dengan takeholder Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue

Pencegahan dan penanganan stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue tidak dapat tercapai jika hanya mengandalkan pemerintah saja, namun membutuhkan dinas-dinas lainnya seperti DINKES, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pembangunan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas-dinas terkait lainnya. Bahkan UNICEF juga turut andil dalam mendampingi tenaga kesehatan untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. *"Untuk menangani stunting di Kabupaten Simeulue ini tidak hanya Pemerintah, dia ada tupoksinya masing-masing, seluruh Dinas harus bergabung, sama-sama kita tangani stunting ini"*. Kata Andri Ifani, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA Kabupaten Simeulue.

BAPPEDA terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue dan bertanggung jawab dalam mendiskusikan perencanaan strategi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue serta anggaran stunting di Dinas Kesehatan Simeulue. Pernyataan Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA di atas menunjukkan bahwa BAPPEDA memiliki andil cukup besar untuk menyusun serta menerapkan rancangan anggaran untuk melancarkan strategi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue. Hal tersebut dilakukan tidak lain yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Simeulue bebas stunting 2022.

Karena ini memang tidak boleh ditunda apa lagi diabaikan, *"boleh program lain hilang, program stunting tidak boleh karena itu sudah menjadi mandatory yang diberikan dari pusat kepada kita"* pungkas pak Zulfadli Abidin SE, kepala Bappeda Kabupaten Simeulue. Terlepas hasil evaluasi prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue pada tahun 2020 tentu memberikan pemerintah Kabupaten Simeulue sadar akan keseriusan strategi dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue di tahun 2021.

Strategi harus konsisten terhadap lingkungan, strategi dilakukan mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang

dibentuk maka strategi yang satu harus konsisten dengan strategi yang lainnya. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai-beraikan itu dengan yang lain. Strategi jangka panjang sangat perlu diintensifkan peluang dalam dukungan kolaborasi antar sektor dan multistakeholders guna menjamin keberlanjutan dan pencapaian sasaran akselerasi dalam penurunan stunting (Priyono, 2020).

Penyelenggaraan intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan bukan tanggung jawab institusi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tim lintas sektor dan bukan tanggung jawab institusi saja. Untuk itu, dibentuk sebuah tim lintas sektor sebagai pelaksana Aksi Integrasi. Keanggotaan tim lintas sektor tersebut sekurang-kurangnya mencakup instansi yang menangani: Kesehatan, Pertanian, Perindustrian, Pendidikan, Sosial, Agama, Komunikasi dan Informasi, Pekerjaan Umum, dan Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan Catatan Sipil (Dinkes Kabupaten Simeulue, 2020).

Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penanggulangan stunting sangat besar dalam hal penyusunan kebijakan serta anggaran dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Selanjutnya untuk mekanisme pencatatan dan pelaporannya, menurut pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting Terintegrasi di Desa bahwa setiap tenaga kerja/kader kesehatan di tingkat desa wajib melakukan pencatatan atau pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Serta Pencatatan tersebut dilakukan dengan atau tanpa aplikasi. Program penurunan masalah stunting perlu dimulai dari berbagai kegiatan peningkatan kualitas antenatal care dan kualitas pelayanan kesehatan neonatus dasar berupa penyuluhan tentang menyusui secara eksklusif (Java & Tenggara, 2014).

Rembuk Stunting Kabupaten Simeulue Tahun 2021

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh stunting, maka pemerintah Kabupaten Simeulue mengajak para stakeholder untuk saling bahu membahu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah serta strategi yang terbaik untuk mengatasinya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk mendukung segala hal dan upaya pencegahan dan penanganan stunting, baik itu kebijakan, regulasi, program/kegiatan serta kebutuhan anggarannya.

Dalam mencegah masalah stunting, dibutuhkan upaya yang bersifat holistik serta saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional serta perbaikan gizi harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat serta aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, hingga pelaksana ujung tombak Diseminasi Informasi dan Advocacy perlu dilaksanakan oleh unit teknis kepada stakeholder lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkatan yang sama. Kepada jajaran struktural kebawahnya perlu dilakukan knowledge transfer dan edukasi agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat (Ketut Aryastami & Tarigan, 2017).

Delapan Aksi Konvergensi dalam Penanganan Prevalensi Stunting di Kabupaten Simeulue

Pemerintah Kabupaten Simeulue berharap dapat menghasilkan rencana program/kegiatan yang tepat, serta lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Simeulue dengan harus benar-benar serius dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah selaku pemimpin daerah, DPRK, para kepala SKPK terkait, khususnya di Dinas Kesehatan dan jajarannya, PKK, para Camat, para kepala Desa, sehingga target pada tahun 2021 menuju peringkat pertama. Guna mewujudkan generasi baru yang sehat, cerdas, serta berkualitas, baik dari segi fisik maupun mental serta spiritual.

Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue yaitu melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Stunting. Setiap Aksi mempunyai instrumen pelaksanaannya masing-masing. Pelaksanaan aksi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 atau tepatnya sejak Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai lokus stunting nasional. Adapun 8 Aksi Konvergensi Stunting yaitu sebagai berikut:

Analisis Situasi

Tahap pengumpulan data yang mana sebelum merancang serta merencanakan program [Broom, & Canter, \(1985\)](#). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, memuat jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat tindakan serta strategi yang akan diambil, taktik serta anggaran biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kasus stunting di Kab. Simeulue meliputi: rekomendasi daftar lokasi prioritas (fokus penanganan), rekomendasi daftar intervensi yang memerlukan prioritas penanganan, hasil identifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menysasar rumah tangga 1000 HPK (untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK mengakses layanan) dan rekomendasi hasil analisis situasi.

Rencana Kegiatan

Hasil proses perencanaan daftar yang tetap tentang langkah tindakan yang akan diambil pada masa yang akan datang, meliputi kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, serta berapakah sumber daya yang digunakan, serta beberapa keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka pencapaian hasil meliputi : matriks Rencana Kegiatan Kab/Kota, matriks Rencana Kegiatan Kab/Kota, matriks pemantauan integrasi Rencana Kegiatan pada tahun berjalan, dan matriks pemantauan integrasi Rencana Kegiatan untuk tahun rencana.

Rembuk Stunting

Suatu langkah yang penting untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue secara bersama-sama seperti salinan undangan, salinan paparan hasil analisis situasi dan rekomendasinya, salinan paparan rancangan kegiatan, dan salinan berita acara kesepakatan hasil rembuk.

Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa

- o Salinan Peraturan Bupati /Edaran Kepala BPMD tentang Peran Desa
- o Daftar desa peserta sosialisasi

Pembinaan KPM

KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang merupakan warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk membantu Pemerintah dalam memfasilitasi dan mengawasi kegiatan pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Simeulue.

Tujuan dari pembinaan KPM di seluruh Desa di Kabupaten Simeulue berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penentuan tugas dan KPM dalam melaksanakan integrasi pencegahan dan penurunan kasus stunting di tingkat desa, telah menetapkan SK Kader Pembangunan Manusia, mengalokasikan anggaran operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), mengalokasikan anggaran transport local KPM serta Gawai (HP) berbasis Android untuk operasionalisasi penggunaan aplikasi e-HDW seperti, daftar desa yang telah menerbitkan SK Kepala Desa/Lurah tentang penunjang KPM dan daftar desa yang telah mengalokasikan operasional KPM.

Sistem Manajemen Data

Merupakan suatu sistem sebagai pengelola suatu basis data serta menjalankan operasional terhadap data yang diminta seperti banyak jumlah kasus stunting per desa, seperti matriks data prevalensi dan jumlah kasus stunting per desa, matriks data cakupan intervensi tingkat kab/kota, matriks data cakupan intervensi per desa, status realisasi kegiatan perbaikan sistem manajemen data OPD, serta hasil pemetaan kondisi data sebaran stunting dan cakupan intervensi.

Pengukuran dan Publikasi Stunting

Hal tersebut agar upaya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh data prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue terkini pada skala pelayanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa.

Reviu Kinerja Tahunan

Kinerja tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita selama satu tahun terakhir yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Itulah delapan aksi konvergensi yang akan di laksanakan oleh pemerintah serta para pemagku kepentingan dalam upaya penanganan kasus stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue agar kedepannya Kabupaten Simeulue keluar dari salah satu lokus stunting Nasional pada tahun 2022 nantinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang mana Kabupaten Simeulue mendapat penghargaan dalam penilaian Kinerja stunting dan sebagai Kabupaten Paling Replikatif pada tahun 2020. Pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue harus benar-benar serius dilakukan oleh semua pihak baik Pemerintah selaku pemimpin daerah, DPRK, para kepala SKPK terkait, khususnya di Dinas Kesehatan dan jajarannya, PKK, para Camat, para kepala Desa, sehingga target pada tahun 2021 menuju peringkat pertama dapat diraih. Stunting dapat dituntaskan bila faktor penyebab stunting di setiap wilayah dapat dikendalikan ([Mugianti et al., 2018](#)). "Kita jangan terlalu bangga atas penghargaan yang telah diberikan akan tetapi kita harus berusaha lebih serius lagi dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Simeulue ini agar Kabupaten Simeulue keluar dari Kabupaten yang ditetapkan sebagai lokus stunting terintegrasi pada tahun 2022 yang akan datang". Pungkas Bapak

Bupati Simeulue Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom., pada acara Rembuk Stunting tahun 2021, agar mewujudkan generasi baru yang sehat, cerdas, serta berkualitas, baik dari segi fisik, mental serta spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perumusan strategi penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue adalah dengan membentuk delapan aksi konvergensi dalam penanganan prevalensi stunting pada anak balita yaitu analisis situasi, rencana kegiatan, melaksanakan rembuk stunting di dasari dengan Peraturan Bupati/Walikota, pembinaan KPM, pengukuran publikasi stunting serta review kinerja tahunan. Pemerintah juga melakukan kerjasama lintas sector dalam penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue agar tercapainya tujuan Kabupaten Simeulue keluar dari penetapan lokus stunting terintegrasi pada tahun yang akan datang. Jika didapati kenaikan jumlah balita stunting maka pemerintah serta seluruh dinas terkait lainnya akan merubah strategi dengan mencari solusi terbaik dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua yang turut mendukung, kepada Ibu Nellis Mardhiah S.Sos, M.Sc, sebagai dosen pembimbing, kepada Ibu Rina Darma Surya ST, MT., sebagai Supervisor, yang telah memberi kesempatan, izin, serta bimbingan untuk melakukan penelitian ini. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Simeulue, lintas sektor, dan bidang P2KAPSDM serta teman-teman seperjuangan, atas data dan informasi yang telah diberikan atas dukungan dan asistensinya selama proses pengumpulan data. Terakhir, terimakasih kepada semua pihak atas perhatian, kontribusi, dan kerjasamanya sampai penelitian ini selesai.

REFERENSI

- Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). *Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia*. *Buletin Apri Sulistianingsih, D. A. M. Y.* (2016). Kurangnya Asupan Makan Sebagai Penyebab Kejadian Balita Pendek (Stunting). *Jurnal Dunia Kesehatan*, 5(1), 71–75. <https://www.neliti.com/publications/77123/kurangnya-asupan-makan-sebagai-penyebab-kejadian-balita-pendek-stunting#cite>
- Broom, & Center, (1985). *Effective Public Relations*. 25 May 2010, 205. https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_situasi
- Dinkes, (2020), *Perencanaan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Simeulue*. Cetakan ke 47: Rencana Aksi Daerah.
- Fitri, L. (2018). Hubungan Bblr Dan Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru. *Jurnal Endurance*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i1.1767>
- Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 13 (6), 578-583. doi: 10.1016/j.jsams.2010.03.007

- Hamalding, H., Said, I., & Nurmiaati, S. (2020). Analisis Determinan Kejadian Stunting Di Desa Taraweang Kecamatan Labkkang Kabupaten Pangkep. *Jurnal Dunia Gizi*, 3(1), 09-14. https://scholar.google.com/scholar?hl-id&cas_sdt=0%2C5q=s-tunting+adalah+kondisi+gagal+tumbuh+pada+tubuh
- Hindratni, F., Sartika, Y., & Sari, S. I. P. (2021). Modul Kebidanan Peran Posyandu dalam Pencegahan Stunting. <http://repository.pkr.ac.id/2359/>
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/11.12.simeulue-urutan-12-stunting-di-aceh-bupati-erli-hasyim-minta-laporan-upaya-penurunan-dari-dinkes>
- Intan Kusumawardhani, I. K., I Made Alit Gunawan, I., & Irianton Aritonang, I. A. (2017). ASI eksklusif, panjang badan lahir, berat badan lahir rendah sebagai faktor risiko terjadinya stunting pada anak usia 6-24 bulan di Puskesmas Lendah II Kulon Progo (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta). <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/239/>
- Ivan, Lanin, (2006). *Sistem Manajemen Basis Data*. Oktober 2020. <https://id.m.wikipedia.org>
- Java, W., & Tenggara, E. N. (2014). Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 0—23 Bulan Di Provinsi Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 9(2), 125–132. <https://doi.org/10.25182/jgp.2014.9.2.%p>
- Ketut Aryastami, N., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia Policy Analysis on Stunting Prevention in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.
- Maywita, E. (2018). Faktor Risiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Umur 12-59 Bulan Di Kelurahan Kampung Baru Kec. Lubuk Begalung Tahun 2015. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v3i1.24>
- Mugianti, S., Mulyadi, A., Anam, A. K., & Najah, Z. L. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 5(3), 268–278. <https://doi.org/10.26699/jnk.v5i3.art.p268-278>
- Moleong, Lexi J. (1998), *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesembilan. Bandung: PT. remaja Rosda Karya.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi dan manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ngaisah, S. (2018). *Pendampingan analisis situasi daerah tinggi stunting* 1. 2(1), 71–76.
- Picauly, I., & Toy, S. M. (2013). Analisis Determinan Dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur, Ntt. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(1), 55. <https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.1.55-62>
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa dan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/492/2020 mengenai

- Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Simeulue.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586>
- Pembinaan Kader Pembangunan Manusia. <https://aksi.bangda.komendagri.go.id>
- Pengukuran dan Publikasi Stunting. https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main_detail/223/1457
- Pembinaan Kader Pembangunan Manusia. https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main/data_detail/233/1455
- Rencana. <https://id.m.wikipedia.org>
- Rembuk Stunting. *Kemertrian Dalam Negeri*. https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main/data_detail/223/1453#:~:text=Rembuk%20Stunting%20Mrupakan%20Suatu%20Langka%20Lembaga%20non%20%2Dpemerintah%20dan%20Masyarakat
- Rudmini, F. (2020). *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita Di Kabupaten Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15868/>
- Rustiyan, L., & Susilo, R. (2020). Analisis Faktor Yang Menyebabkan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Kemangkong. *Human Care Journal*, 5(4), 1025-1033. <https://ojs.fdk.ac.id/index.php/humancare/article/view/837>
- Serambinews.com, *Aceh Peringkat Tiga Stunting*, diakses tanggal 03 Agustus 2020, pukul: 20:15, melalui <https://aceh.tribunnews.com/2019/03/04/aceh-peringkat-tiga-Stunting>
- Sumardilah, D. S., & Rahmadi, A. (2019). Risiko stunting anak baduta (7-24 bulan). *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 93-104. <http://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1245>
- Simeulue, D. I. K. (2021). *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita Di Kabupaten Simeulue*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15868/>
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Sujai, M. (2020). Peranan Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Program Pengurangan Stunting Di Indonesia: Studi Kasus Kota Balikpapan. *Journal of Humanity and Social Justice*, 2(2), 99–112.
- Suryana, S., Roudza, R., & Alfridsyah, A. (2018). Konsumsi pangan dan skor pola pangan harapan (PPH) dengan prevalensi stunting di Provinsi Aceh (Data Susenas dan PSG tahun 2016). *Action: Aceh Nutrition Journal*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.30867/action.v3i2.116>
- Widjayatri, R. D., Fitriani, Y., & Tristyanto, B. (2020). Sosialisasi Pengaruh Stunting Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 16-27. <https://murhum.pjpaud.org/index.php/murhum/article/view/11>
- Widanti, Y. A. (2017). Prevalensi, Faktor Risiko, dan Dampak Stunting pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 1(1), 23–28.
- Yadika, A. D. N., Berawi, K. N., & Nasution, S. H. (2019). Pengaruh Stunting terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar. *Jurnal Majority*, 8(2), 273–282. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2483>